

ABSTRAK

Fenomena re-slum atau kembalinya permukiman kepada kondisi kumuh pasca penanganan menjadi tantangan penting bagi pengelolaan permukiman perkotaan, termasuk di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. Kelurahan Tambakrejo merupakan lokasi yang pernah mendapatkan program penanganan permukiman kumuh, namun masih memiliki potensi re-slum akibat tekanan ruang, lingkungan dan ekonomi. Permasalahan ini menegaskan pentingnya mengkaji bagaimana upaya pencegahan re-slum dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pencegahan re-slum berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Tambakrejo pasca penanganan permukiman kumuh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan penyebaran kuesioner kepada 95 responden. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat yang sudah tinggal di kawasan pernah kumuh Kelurahan Tambakrejo selama 3 tahun atau lebih dan dipilih menggunakan teknik proportional random sampling berdasarkan RW. Data hasil kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian diolah melalui beberapa tahapan analisis meliputi perhitungan bobot indikator menggunakan Entropy Weight Method, serta pengelompokan tingkat pencegahan re-slum menggunakan analisis K-Means Clustering. Hasil clustering selanjutnya dipetakan untuk menunjukkan sebaran spasial tingkat pencegahan re-slum pada setiap RW di Kelurahan Tambakrejo. Setelah mengetahui sebaran tingkat pencegahan, kemudian dilakukan analisis gap antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal pencegahan re-slum berbasis partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tingkatan pencegahan re-slum berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Tambakrejo, yaitu tingkat tinggi pada RW 2 dan RW 9, tingkat sedang pada RW 3, RW 6, dan RW 8, serta tingkat rendah pada RW 1, RW 4, RW 5, dan RW 7. Tingkat tinggi menggunakan pendekatan tersier yang dicirikan oleh partisipasi reaktif dengan intensitas tinggi namun belum didukung kondisi fisik infrastruktur yang memadai. Tingkat sedang menggunakan pendekatan sekunder yang dicirikan oleh kondisi fisik terjaga namun pengawasan berjalan tanpa pelaporan dan pengelolaan kelembagaan yang belum terstruktur. Tingkat rendah menggunakan pendekatan tersier yang dicirikan oleh hampir tidak berfungsinya seluruh dimensi partisipasi dengan ketergantungan penuh pada pihak eksternal. Secara keseluruhan, Kelurahan Tambakrejo belum sepenuhnya terindikasi mengalami re-slum, namun RW-RW pada tingkat rendah menunjukkan gejala awal degradasi yang apabila tidak segera direspons berpotensi memicu terulangnya kekumuhan dalam jangka pendek. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan penanganan fisik permukiman kumuh tidak secara otomatis menghasilkan kapasitas pencegahan yang berkelanjutan tanpa disertai penguatan dimensi sosial, kelembagaan, dan ekonomi secara bersamaan. Pencegahan re-slum yang efektif tidak dapat hanya berfokus pada penguatan kelembagaan di tingkat RW, melainkan harus dimulai dari penguatan peran RT sebagai unit tata kelola terkecil yang paling dekat dengan keseharian warga, sebagai fondasi sebelum sistem pencegahan yang lebih komprehensif dapat berjalan pada skala yang lebih luas.

Kata Kunci: *re-slum, partisipasi masyarakat, infrastruktur, pencegahan, pemeliharaan*